

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemitraan Trans Pasifik atau *Trans Pacific Partnership* (TPP) adalah salah satu Perjanjian Perdagangan Bebas berbentuk multilateral yang beranggotakan beberapa negara-negara pengusul bagian Lingkar Pasifik yang terdiri dari beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, Singapura, pada 2005. Anggota perjanjian perdagangan tersebut semakin bertambah pada 2008 yaitu Amerika Serikat (AS), Australia, Vietnam, Peru, dan bertambah lagi dengan Kanada, Jepang, Meksiko dan Malaysia membuat jumlah anggota perjanjian semakin genap menjadi 12 anggota negara dengan AS menjadi pemimpin dalam negosiasi perjanjian perdagangan ini. Perjanjian ini menjadi perjanjian *Mega Trade Bloc* dari 12 negara anggota tersebut diatas kerangka hukum terhadap kerjasama perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi global (Pratomo, 2016).

Negara-negara anggota TPP sepakat bahwa perjanjian perdagangan ini akan menjadi kesepakatan perdagangan terbesar di dunia yang mencakup 40% dari perekonomian global, dengan pasar anggota yang lebih dari 800 juta penduduk, membuat dua kali lipat dari pasar tunggal Uni Eropa. Mereka juga bersepakat bahwa perjanjian kerjasama ini akan menguntungkan masing-masing negara anggota dan kawasan di Asia Pasifik, dimana hasil dari perjanjian ini nantinya diharapkan akan meningkatkan perdagangan antarnegara termasuk

investasi, memacu pertumbuhan kawasan ekonomi strategis, menurunkan harga produksi, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi lingkungan industri dengan pendekatan dan standard regulasi yang berbeda-beda pada setiap anggota (BBC, 2017). Selain itu Perjanjian tersebut juga memiliki regulasi yang menuntut negara-negara anggotanya untuk membuka pasarnya agar lebih lebar terhadap perdagangan bebas sehingga akan memperlancar arus perdagangan global yang nantinya berdampak pada investasi namun dalam prosesnya

Diantara negara yang ikut dalam perjanjian dagang ini adalah Jepang yang memutuskan untuk bergabung pada 23 Juli 2013. Bergabungnya Jepang ke dalam TPP disebabkan oleh tiga alasan, Adapun alasan bergabungnya Jepang dalam TPP adalah, *Pertama* adanya keinginan Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jepang dan menunjukkan peran eksistensi Jepang di Asia Pasifik setelah jalan panjang Putaran Doha yang belum menemukan jalan keluar, sehingga TPP akan menjadi peluang Jepang untuk menjadi bagian terpenting bagi Asia Pasifik. *Kedua*, Jepang selama ini merasa tertinggal dengan kerjasama perdagangan bebas meskipun telah menandatangani 13 perjanjian perdagangan. Hal tersebut juga direfleksikan dari dua negara tetangga yaitu Korea Selatan dan Tiongkok yang semakin maju dengan kerjasama dengan Uni Eropa dan AS pada 2012 lalu. Dengan demikian jika TPP dapat segera diterapkan maka akan menjadi peluang bagi Jepang untuk membentuk peraturan aktivitas ekonomi baru bagi kawasan Asia Pasifik. *Ketiga*, Jepang juga yakin bahwa TPP akan membantu meningkatkan reformasi ekonomi domestik yang juga masih dalam tingkat negosiasi dengan oposisi, dan terakhir TPP akan menjadi harapan bagi Jepang

untuk menjadikan negaranya strategis di kawasan pasar Asia (William Cooper, Mark Manyin, 2013).

Pada perkembangannya, terdapat dinamika dalam TPP dengan keluarnya Amerika Serikat pada tahun 2017 pasca terpilihnya Presiden Donald J. Trump dari perjanjian perdagangan multilateral tersebut yang beralasan perlindungan tenaga kerja domestik. TPP berubah nama menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) atau Kemitraan Trans Pasifik Komprehensif dan Progresif dengan anggota yang sekarang dikenal dengan TPP-11 pada Maret 2018. Mereka harus maju melanjutkan perundingan perjanjian yang telah mereka sepakati tanpa AS, negara TPP-11 mempertahankan beberapa regulasi didalam perundingan perjanjian perdagangan bebas tersebut tetap utuh. Perubahan sub-bab yang dianggap substansif dalam regulasi tersebut adalah bagian pembahasan properti intelektual yang telah dihapus, bab investasi juga mengalami perubahan, perubahan substansi *Investor State Dispute Settlement* (ISDS), dan beberapa hal mengenai regulasi ketenagakerjaan (McBride, 2018).

Keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat Jepang pada awalnya bersikap pesimis, ia menganggap keluarnya AS dari TPP akan berdampak terhadap pasar dikawasan strategis mitra, dimana AS memiliki 250 juta konsumen, sehingga jika AS keluar maka potensi pasar akan berkurang. (Nirmala, 2017). Selain itu Jepang juga menjadi negara yang paling merasakan kehilangan keuntungan dari keluarnya AS selain Vietnam dan Malaysia sehingga menurunnya potensi ekonomi dari US\$ 465 menjadi 157 US\$ Cicilia (2018). Disamping itu, Perdana Menteri Shinzo Abe menganggap kesepakatan yang terjalin dengan AS merupakan upaya Jepang untuk mendorong pertumbuhan dan

reformasi di domestik Jepang. Dengan keluarnya Amerika Serikat dari TPP maka, Abe menganggap aliansi perdagangannya tersebut semakin terlihat tidak bebas dan Abe melihat hilangnya peluang jika menggunakan visi strategis yang akan berdampak pada mundurnya tatanan perdagangan global (Vargö, 2018).

Meskipun Amerika Serikat sebagai partner dagang utama Jepang dalam TPP keluar, namun Jepang masih mempertahankan negosiasi dalam CPTPP. Upaya Jepang dalam mempertahankan perjanjian TPP semakin jelas dengan tekad Jepang untuk lebih terbuka terhadap perdagangan bebas dan mendukung perlawanan terhadap proteksionisme dan menciptakan area ekonomi terbuka terbesar didunia yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini didukung dengan terjalannya kerjasama ekonomi bilateral antara Jepang dan Uni Eropa yang ditandatangani pada pertemuan G20 (Idrys, 2017). Konsumen Jepang juga telah membuka lebar pasarnya untuk produsen AS namun ketentuan Jepang dalam soal keamanan harus dipatuhi, dimana impor penjualan tahunan yang berjumlah lebih dari 2000 unit tersebut membutuhkan penetapan tipe yang merupakan syarat pemerintah Jepang. Kemudian pembuat mobil harus menyerahkan kendaraan sampel kepada pemerintah Jepang untuk pemeriksaan produk guna mematuhi standar keamanan Jepang (Tanabe, 2012).

Pertimbangan Jepang untuk ikut bergabung dan mempertahankan perjanjian yang hampir dianggap gagal tersebut tentu bukan formalitas untuk mencapai tujuan perjanjian. Jepang melihat potensi yang sangat besar, TPP akan menjadi peluang akses pasar baru yang sangat menguntungkan bagi negara eksportir besar tersebut. TPP juga akan menjadi pendorong utama bagi reformasi

perekonomian Jepang dimana TPP akan meningkatkan produktivitas yang ada pada pasar Jepang termasuk investasi, meningkatkan daya saing yang semua hal tersebut akan berefek pada peningkatan PDB negara. Selain itu, bagi Shinzo Abe, keikutsertaan Jepang nantinya akan memberikan stimulus pada implementasi paket kebijakan ekonominya yaitu *Abenomics 2.0* yang akan lebih memberikan dampak yang signifikan pada pelonggaran moneter dan depresiasi mata uang Yen (mcbazer, 2013).

Dengan keluarnya Amerika Serikat dari TPP, tentu merupakan sebuah kerugian bagi Jepang, mengingat Amerika Serikat merupakan partner dagang utama dalam kerangka TPP. Meskipun demikian, keluarnya Amerika Serikat, tidak membuat Jepang mundur dari perjanjian perdagangan ini. Melainkan tetap berusaha untuk melanjutkan dan mempertahankan negosiasi kerjasama yang terjadi dalam CPTPP. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas. Mengingat membahas mengenai kelangsungan CPTPP dalam menghadapi tantangan dalam fase selanjutnya. Dengan demikian perlu juga untuk melihat strategi Jepang sebagai salah satu aktor utama dalam perjanjian perdagangan ini dalam melanjutkan proses negosiasi, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi kerjasama CPTPP.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jepang tetap mempertahankan negosiasi perjanjian kerjasama CPTPP paska keluarnya Amerika Serikat dari TPP ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan strategi pemerintah Jepang dalam mempertahankan negosiasi perjanjian TPP paska keluarnya Amerika Serikat
- b) Untuk mengetahui alasan Jepang mempertahankan negosiasi perjanjian TPP paska keluarnya Amerika Serikat

1.3 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu upaya penting dalam memperdalam pengetahuan mengenai sistem politik pemerintah Jepang dalam perannya untuk mereformasi sistem ekonomi negara dalam upayanya mempersiapkan perundingan TPP dan salah satu upaya meningkatkan wawasan sejarah Jepang, mengingat negara tersebut merupakan negara yang dikenal dengan negara yang ketat dalam memproteksi produk ekspor sektor agrikultur dan tingginya tarif bea barang impor. Beberapa hal dalam penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda dari pada penelitian pada umumnya dimana penelitian ini hanya akan membahas mengenai upaya Jepang dalam mempertahankan negosiasi perjanjian CPTPP dengan berbagai strategi yang dilakukan dalam rentang waktu 2017 – 2018.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini fokus pada politik luar negeri mengenai kebijakan ekonomi politik Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe mengenai kesiapan dan eksistensinya dalam negosiasi TPP, dimana Jepang sendiri mulai memberanikan diri untuk ikut bergabung dengan TPP pada tahun 2013 yang pada sebelumnya dibahas mengenai keinginan untuk bergabung pada pertemuan APEC 2011.

Jepang melakukan negosiasi selama kurang lebih 8 tahun untuk bergabung pada masa Yoshihiko Noda. Kemudian, hal menarik yang menjadi landasan penulis dalam penelitian ini adalah kebijakan untuk ikut serta dalam negosiasi CPTPP mendapat penolakan dari dalam domestik dan oposisi, namun keberlanjutan Jepang dalam CPTPP tetap berjalan, hingga akhirnya Jepang berhasil menjadi anggota aktif CPTPP bahkan menjadi *leader* pasca keluarnya AS. Dari kasus singkat ini penulis melihat bagaimana proses kebijakan luar negeri Jepang terkait ekonomi atau perdagangan diambil dapat meningkatkan eksistensinya dalam negosiasi CPTPP dengan menggunakan teori *Decision Making Proccess (Model Bureaucratic Model)* yang juga digunakan untuk melihat kepentingan Jepang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan cara mempersiapkan diri dalam ikut bergabung dan menjadi bagian penting dari negosiasi perjanjian CPTPP.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai strategi Jepang dalam TPP dapat dilihat dari beberapa tulisan, menurut Mirey Solis dan Shujiro Urata (2017) kebijakan perdagangan Jepang di masa Shinzo Abe menjadi puncak kebangkitan ekonomi Jepang dimana Shinzo Abe melakukan pendekatan sebagai suatu peluang dalam memadukan kepentingan ekonominya yaitu dengan masuknya TPP, maka juga akan menjadi peluang untuk Jepang melakukan upaya, menciptakan peluang perdagangan dan investasi luar negeri untuk perusahaan Jepang melalui liberalisasi yang besar. Selain itu, Kebijakan Abenomics yang akan menjadi langkah reformasi liberalisasi bagi pertanian domestik meskipun kebijakan tersebut juga mendapat pertentangan kecil dari oposisi domestik. ketika Amerika Serikat (AS) memilih

keluar dari TPP, hal itu mempengaruhi dari tidak terpenuhinya target Abenomics memilih untuk melakukan kerjasama *multicooperation* dengan Eropa namun juga tetap mempertahankan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dimana didalamnya terdapat beberapa poin penting yang harus disepakati yaitu Hak Akses Obat, Hak Petani yang mewajibkan negara melindungi varietas tanaman. Jepang juga menambah mitra pada 2014 dengan Australia dan Perjanjian Perdagangan dengan Eropa pada 2017 yang memperlihatkan Jepang sebagai eksportir pertanian yang besar. (Mireya Solis and Shujiro Urata, 2017)

Sementara Hye Mi Nam (2017) berpendapat bahwa keseimbangan negosiasi Jepang dalam partisipasinya pada TPP dan kebijakannya terhadap produksi pertanian, dimana setelah terpilihnya Abe sebagai Perdana Menteri periode kedua pada 2012, ia langsung memutuskan masuk kedalam TPP. ia juga menjelaskan bahwa preferensi dari Abe terbagi dalam dua kelompok domestik yaitu Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), Kementerian Luar Negeri (MOFA), komunitas bisnis dan Kelompok status quo atau kebijakan pertanian tradisional yaitu Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF), Norin Zoku, di Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Koperasi Pertanian Jepang (JA). Meski banyak pertentangan dari oposisi seperti JA yang giat melakukan demonstrasi anti TPP. tetapi dalam kepemimpinannya Abe tetap memberikan arahan terhadap kebijakan reformasinya terhadap JA dalam pertemuan ICC (Dewan Daya Saing Industri) yang memiliki komunitas petani untuk mempertahankan harga domestik yang tinggi untuk produk pertanian dan melakukan anti praktek bisnis kompetitif, dengan cara tersebut secara tidak langsung ICC dan CRR juga telah melemahkan kepentingan JA. Ketua Yasufumi

Kanemaru pada tahun 2014 juga merilis usulan penghapusan Koperasi Pertanian Pusat meskipun akhirnya harus direvisi karena tekanan dari LDP dan JA. Abe tetap dalam negosiasi TPP tapi Abe memilih pengecualian tertentu dalam perjanjian TPP terhadap AS. Pembayaran sampingan adalah salah satu upaya antisipasi hasil dari TPP, kemudian langkah melalui MAFF merancang organisasi untuk mediasi pengelolaan lahan pertanian dan sistem pembayaran langsung sebagai upaya penyesuaian produksi beras. Menurutnya, kepemimpinan Abe yang kuat berhasil mengubah cara pandang preferensi dan koalisi konstituen Jepang untuk mendukung kebijakan TPP-nya, dengan secara politik telah mengurangi pengaruh kekuasaan oposisi JA dengan diciptakannya reformasi pertanian yang disebut dengan "*historical major agricultural reform*", kedua ia juga memasukkan pembuat kebijakan masuk untuk mengacu pada negosiasi TPP reformasi agrikultur oleh eksekutif, semua kementerian mengacu pada Abe dan hak veto MAFF dibatasi dan melemah. ia juga dianggap berhasil menekan perlawanan dari Norin Zoku. dan Meti, Zoku MOFA (Kebijakan komersial industri) sebagai kantei adalah pendukung kuat partisipasi TPP Jepang. denganya ia bisa menekan JA sebagai jalur untuk menyetujui TPP. (Nam, 2017)

Sementara itu Awele Oguejiofor dan Uzoamaka Unachukwu (2015) menjelaskan bahwa Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe telah menggunakan pendekatan Keynesian untuk mengatasi perekonomian dalam negerinya yang dikenal dengan Abenomics yang fokusnya pada pembelanjaan pemerintah dalam permasalahan perkerjaan, dimana akan mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan yang nantinya akan meningkatkan ekonominya dari stagnasi, selain itu Pemerintah dalam meningkatkan perekonomiannya

menggunakan model pembangunan campur tangan antara pemerintahan dan perencanaan ekonomi, pasar Jepang tidak mengacu pada perdagangan bebas namun mengacu pada kepentingan nasional itu sendiri. Dalam artikel ini, penulis juga memberikan gambaran asumsi berupa saran untuk pembangunan ekonomi Jepang, dimana pertama ia meletakkan tiga faktor penting dalam memerankan pembuatan kebijakan ekonomi, yaitu politik, sosial dan budayanya dimana harus saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian, pemerintah seharusnya mengadopsi sistem imigrasi berbasis poin guna menarik pekerja lebih terampil, meningkatkan tingkat kelahiran, mengeluarkan kebijakan yang lebih inklusif agar perempuan ikut terdorong untuk berpartisipasi dalam pekerjaan umum, meningkatkan energi negara dan meningkatkan investasi asing yang dikontekstualisasikan dan disesuaikan pada kebutuhan dan realitas negara tersebut. (Awele Oguejiofor, Uzoamaka Unachukwu, 2015)

Kemudian menurut Takeo Hoshi (2018) FDI di Jepang merupakan salah satu kebijakan utama yang menjadi strategi untuk pertumbuhan cepat yang dirumuskan pada 2013. menurutnya, meskipun Abenomics yang merupakan reformasi terbaru Shinzo Abe sudah berjalan namun, promosi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berpengaruh. secara umumnya dengan beberapa bukti dapat disimpulkan bahwa peningkatan FDI terhadap pertumbuhan adalah lemah yang menimbulkan beberapa keraguan mengenai promosi FDI, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor, misalnya tingginya pembiayaan bisnis, administrasi FDI kedalam Jepang yang rumit, dan kepercayaan perusahaan asing terhadap Jepang meningkat 10% yang artinya keamanan karyawan lebih terjaga meski demikian hal ini juga memperlihatkan faktor kekurangan tenaga kerja di

Jepang, namun jika melihat rencana meningkatkan saham FDI menjadi 35 triliun yen pada 2020. pada kenyataannya dapat dilihat bahwa pada 2012 hingga 2015 memang meningkat dari 19,2 triliun yen menjadi 24,4 triliun yen. ini menunjukkan bahwa reformasi Abenomics pada promosi FDI memiliki pengaruh dalam peningkatan ekonomi, namun tidak terlalu signifikan. (Hoshi, 2018)

San Feng dan Zhang Xiao-lan (2014) memaparkan bahwa reformasi Jepang dianggap telah berpengaruh secara signifikan dalam waktu pendek, sehingga Jepang mengalami pemulihan yang sangat cepat, meskipun misi reformasi ekonomi tersebut masih banyak yang harus diselesaikan dan dibuktikan oleh waktu pelaksanaan Abenomics itu sendiri. kebijakan tersebut pastilah terdapat konflik yang inheren dan kesulitan dalam penerapan namun dapat terkompromikan dengan hasilnya. dibawah kebijakan fiskal yang ketat, lemahkan permintaan domestik, resistensi yang berat terhadap reformasi regulasi, prospek pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka waktu menengah diprediksi tidak optimis dan tampaknya misi tersebut sulit diselesaikan. (SAN Feng, ZHANG Xiao-lan, 2014)

Dari penelitian-penelitian diatas semuanya membahas mengenai reformasi ekonomi Jepang, dengan menggunakan berbagai pendekatan yang telah dijelaskan dalam menganalisa reformasi ekonomi Jepang untuk membuktikan hipotesa yang dimilikinya. Penelitian ini dibuat juga untuk menambahkan serta melengkapi dari penelitian yang belum dibahas pada penelitian-penelitian tersebut. Selain itu, penelitian ini memfokuskan pada kajian ekonomi politik Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya yang digunakan untuk mempertahankan eksistensinya dalam CPTPP dengan menggunakan teori pengambilan keputusan

(*decision making*) milik Graham T. Allison dengan melihat proses pengambilan kebijakan dari faktor yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan tersebut, pertimbangan dan tantangannya dan juga untung-rugi pada saat pengambilan keputusan tersebut diambil.

1.6 Landasan Konseptual

Bureaucratic Model (Decision Making Process)

Proses kebijakan politik luar negeri terbentuk merupakan salah satu hal menjadi pembahasan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Diantara banyak pemikir ilmu hubungan internasional adalah Graham T. Allison yang mencoba menjelaskan proses munculnya sebuah kebijakan politik luar negeri terbentuk. Dalam artikel yang ditulis oleh Allison, menerangkan mengenai tiga model yang dapat digunakan dalam menjelaskan kebijakan politik luar negeri. *Pertama*, Model I *Rational Policy*, merupakan pendekatan yang mengambil negara sebagai aktor utama, dalam hal ini dilalui dengan tahapan berupa penentuan tujuan, alternatif-alternatif, konsekuensi dan pilihan keputusan. *Kedua*, Model II *Organizational Process Model*, merupakan pendekatan yang menekankan pada pembuatan kebijakan luar negeri ditentukan oleh adanya mekanisme prosedural yang berlaku dalam suatu negara. *Ketiga*, Model III, *Bureaucratic Politics Model*, merupakan pendekatan yang menekankan pada pengambilan kebijakan luar negeri ditentukan oleh tarik ulur dari berbagai pihak, kelompok kepentingan dan *stakeholders* lain. Dengan demikian keputusan yang muncul merupakan resultan dari proses politik yang panjang (Allison, 1969, 689-91).

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan alasan Jepang yang pada akhirnya mempertahankan negosiasi CPTPP meskipun Amerika Serikat selaku aktor utama telah keluar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan tinjauan Model III “*Bureaucratic Politics Model*” mencoba untuk menjelaskan terbentuknya Kebijakan Politik Luar Negeri.

Dalam penjelasan yang diberikan Graham T. Allison digambarkan bahwa pendekatan “*Bureaucratic Politics Model*” ini digunakan untuk menjelaskan mengenai studi kasus keamanan yaitu pada saat penentuan kebijakan Amerika Serikat saat krisis misil Kuba. Sehingga dengan jelas penjabaran dilakukan dengan contoh dalam studi kasus keamanan, namun pendekatan ini tidak hanya terbatas untuk studi keamanan, melainkan juga semua hal yang terkait dengan proses penentuan atau pengambilan kebijakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Graham T. Allison dalam tulisannya menjabarkan bahwa setiap kebijakan merupakan hasil dari politik “*Basic Unit of Analysis : Policy as Political Outcome*”.

“The decisions and actions of governments are essentially intra-national political outcomes in the sense that what happens is not chosen as a solution to a problem but rather results from compromise, coalition, competition, and confusion among government officials who see different faces of an issue; political in the sense that the activity from which the outcomes emerge is best characterized as bargaining. Following Wittgenstein’s use of the concept of a “game,” national behavior in international affairs can be conceived as outcomes of intricate and subtle, simultaneous, overlapping games among players located in positions, the hierarchical arrangement of which constitutes the government. These games proceed neither at random nor at leisure. Regular channels structure the game. Deadlines force issues to the attention of busy players. The moves in the chess game are thus to be explained in terms of the bargaining among players with separate and unequal power over particular pieces and with separable objectives in distinguishable subgames” (Allison, 1969, p. 708).

Kutipan diatas menunjukkan bahwa keputusan dan aksi suatu negara merupakan hasil dari dialektika aktor intra-nasional (domestik). Sehingga pendekatan ini fokus pada proses terbentuknya sebuah sikap, keputusan, tindakan

atau kebijakan dari sebuah pemerintahan (negara). Oleh karena hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan ini, meskipun menjadikan studi kasus misil Kuba sebagai studi penelitian, namun tidak hanya studi keamanan yang dapat dijelaskan menggunakan pendekatan ini. Selama suatu studi kasus berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan, keputusan atau tindakan. Maka hal-hal tersebut dapat dijelaskan menggunakan pendekatan ini termasuk dalam menjelaskan alasan Jepang tetap bertahan dalam negosiasi CPTPP paska keluarnya Amerika Serikat pada 2017. Hal ini disebabkan dalam prosesnya, bertahnya Jepang dalam negosiasi CPTPP juga merupakan hasil dari dialektika aktor intra-nasional Jepang.

Sebagai perangkat analisis lanjutan dalam menganalisis bagaimana sebuah kebijakan terbentuk. Graham T. Alisson menggunakan identifikasi terhadap masalah yang terjadi. Dalam hal ini Alisson menjabarkan tujuh (7) hal yang harus di indentifikasi sebelum melakukan analisis. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut;

a. Players in Positions

Dalam hal ini merupakan pihak-pihak yang dapat memainkan peran dalam penentuan kebijakan politik luar negeri. Hal tersebut semakin penting apabila seorang pemain menjabat dalam posisi penting dalam sebuah pemerintahan. Dalam artikel, Alisson mencontohkan bahwa posisi seperti direktur intelegen, menteri luar negeri, presiden dll. Pada penelitian ini penulis menjabarkan mengenai pihak-pihak yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan di

Jepang yang mempengaruhi kebijakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, pp. 708-9).

b. Parochial Priorities, Perceptions and Issues

Pada hal ini setiap pemain memiliki prioritas terbatas, persepsi dan isu-isu mengenai hal yang berkaitan dengan sebuah isu yang dibahas. Dengan demikian memungkinkan terdapat perbedaan prioritas antara sesama pemain. Dalam penelitian ini berusaha untuk menjabarkan prioritas terbatas, persepsi dan isu yang diperjuangkan sehingga mendorong adanya sikap Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. 709).

c. Interest, Stakes and Power

Pada hal ini setiap pemain juga memiliki kepentingan, taruhan dan kekuatan. Masing-masing berlomba agar kepentingan tercapai, adapun kepentingan yang berhasil ditentukan oleh kekuatan dan kekuatan tawar yang dimiliki. Dengan demikian pada penelitian ini menjabarkan mengenai kepentingan, taruhan dan kekuatan yang bermain dalam pengambilan keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. 710).

d. The Problems and the Problems

Pada tahap ini membahas mengenai konsekuensi dari masalah yang muncul. Dalam hal ini masalah muncul lebih kepada ketika sudah mencapai “*deadline*” atau tenggat waktu. Sehingga masalah tersebut harus diatasi oleh pemain. Dalam penelitian ini, maka akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi oleh

pemain dari konsekuensi keputusan yang mereka ambil dalam mendorong adanya negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid).

e. Action Channels

Pada hal ini merupakan sarana yang akan digunakan oleh pemain dimana mengandung dua komponen yaitu “keuntungan” dan “kerugian”. Dari beberapa opsi yang diusulkan oleh beberapa pemain maka dipertimbangkan aspek keuntungan mana yang paling besar. Dengan demikian penelitian ini juga mencari tahu mengenai saran aksi seperti apa yang ditawarkan oleh pemain-pemain yang ada, lantas manakah yang pada akhirnya menghasilkan keputusan Jepang dalam sikapnya yang mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid).

f. Action as Politics

Pada tahap ini, keputusan yang dibuat pemerintah tidaklah dibuat secara kebijakan yang telah diperhitungkan maupun sikap tunggal dari pemerintah. Melainkan dibuat berdasarkan beberapa opsi-opsi yang ditawarkan oleh beberapa pemain kepada pemerintah. Pada akhirnya dipilih sesuai dengan fakta yang aktual dan konsekuensi yang jelas sesuai pertimbangan negara. Dengan demikian tercipta sebuah kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini juga menjelaskan opsi-opsi yang ditawarkan oleh beberapa *stakeholders* sebelum Jepang memutuskan untuk tetap mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid)

g. Streams of Outcome

Pada akhirnya keputusan pemerintah dihasilkan dari kumpulan tindakan beberapa pemain “*individu*”, hasil minor, permainan utama dan pelanggaran.

Dengan demikian merupakan rumusan dari beberapa hal yang telah ditentukan dari tahap-tahap sebelumnya. Penelitian ini juga melihat pengaruh signifikan dari aktor mana yang berpengaruh pada pembuatan keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP (Allison, 1969, p. Ibid).

Sementara itu, setelah identifikasi 7 hal maka terdapat tiga preposisi umum dalam “*Bureaucratic Model*”. Tiga preposisi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Actions and Intention

Tindakan tidak dimulai (diandaikan) dengan niat. Perilaku dari tindakan pemerintah pada isu-isu berkaitan jarang diawali dengan niatan dari individu ataupun kelompok. Melainkan individu-individu terpisah dengan berbagai niatan berkontribusi sebagai bagian-bagian dalam menyusun hasil keluaran yang berbeda dari yang akan dipilih. Dengan demikian dalam hal ini, sebuah kebijakan muncul akibat percampuran dari berbagai niatan dari aktor-aktor individu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan (Allison, 1969, 711). Dengan demikian, maka penelitian ini menjabarkan niatan dari pemain atau aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP.

2. Where You Stand Depend On Where You Sit

Secara horizontal, aktor-aktor yang terlibat tentu memiliki permintaan yang masing-masing berbeda. Beragamnya permintaan juga merupakan hal yang membentuk hal-hal yang dituju seperti prioritas, persepsi dan isu. Sementara itu, sikap dari aktor-aktor dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tepat dengan menggunakan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan posisi yang dia miliki. Oleh karena itu dalam hal ini Alisson menyebut “*where you stand depend*

on where you sit". Dipahami bahwa sikap, prioritas dari pemain dapat diketahui melalui kursi "*seat*" yang dimiliki. Alisson juga mencontohkan bagaimana testimoni Admiral Radford terkait dengan masalah B-36 berbeda dengan klaim Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat, Mr. Symington. Perbedaan ini terkait dengan posisi atau "*seat*" yang keduanya duduki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya interseksi antara permintaan-permintaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor membentuk tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu hal itu dapat diprediksi atau diketahui melalui posisi yang aktor atau pemain duduki (Allison, 1969, Ibid). Dengan demikian maka penelitian ini menjelaskan mengenai posisi yang di duduki oleh aktor-aktor atau pemain yang terlibat dalam perumusan kebijakan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP.

3. *Chiefs and Indians*

Disamping memiliki aspek horizontal, perkataan "*where you stand depends on where you sit*" juga memiliki aspek vertikal. Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang cenderung berbeda terhadap "*President, Chief, Staffers* dan *Indians*". Dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, maka pihak yang akan memikirkan secara matang merupakan pemain-pemain dalam Kementerian Luar Negeri bersama Menterinya. Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya dalam merumuskan setiap tindakan kebijakan politik luar negeri, mengingat jadwal padat yang dimiliki. Presiden hanya memberikan perhatian pada isu-isu yang dianggap sangat penting. Dengan adanya pada isu-isu yang dianggap sekunder maka Kemlu harus memikirkan hal tersebut secara matang, mengingat presiden memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Akibat adanya perumusan yang dilakukan pada level bawah presiden maka tidak menutup kemungkinan terjadi tarik ulur antara

pihak yang berada dibawah presiden tersebut, semisal antara kementerian. Hal tersebut juga belum meliputi tuntutan yang disuarakan oleh orang Indian. Dengan demikian dipahami bahwa terdapat tuntutan-tuntunan tertentu yang sifatnya vertikal. Dalam hal ini tuntutan yang mendapatkan izin atau diakui presiden merupakan hal yang dapat dianggap sebagai hal yang penting (Allison, 1969, Ibid). Dalam penelitian ini maka penulis menjabarkan mengenai tuntutan-tuntunan vertikal yang merupakan pergulatan dari *Chief* dan *Indians*. Dimana pergulatan tersebut kemudian mendorong Perdana Menteri Jepang untuk mempertahankan negosiasi CPTPP.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan data kuantitatif sebagai data pendukung. metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yang menelaah dan mencermati suatu fenomena sosial dalam situasi yang sedang berlangsung secara ilmiah dan bukan dalam situasi yang sudah terkontrol atau dikendalikan.

a. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2006), subyek penelitian adalah sesuatu hal yang memiliki sifat dan keadaan yang bisa diteliti yang dapat berupa orang, benda, komunitas maupun organisasi atau subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Menurut Husein Umar (2005) Obyek Penelitian adalah hal yang menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian dan juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini Adapun obyek yang akan diteliti adalah upaya domestik Jepang dalam mempertahankan perjanjian CPTPP dan segala hal yang berkaitan dengan peran baik pada level pemerintahan maupun maupun pada masyarakat.

b. Metode Pengumpul Data

Sesuai dengan jenis penelitian, dokumentasi berupa kata-kata akan diolah bukan berupa angka yang dapat terhitung dimana data-data kualitatif akan menjelaskan gambaran penelitian. Adapun ada 3 cara dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara langsung, observasi dan pemanfaatan dokumen tertulis. (Quinn, 1991)

Namun dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data pemanfaatan dokumen tertulis. Pemanfaatan Dokumen Tertulis, cara pengumpulan data ini yaitu melalui penelusuran berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang sesuai dengan tema atau topik yang diambil. Data yang diambil pun dapat berupa primer yaitu sumber data yang langsung diambil dari website resmi Jepang dan TPP atau lembaga yang berkaitan dan juga menggunakan data sekunder yang berupa tulisan-tulisan, jurnal, artikel lembaga lain yang terkait dengan upaya Jepang dalam mempertahankan perjanjian TPP. Sesuai dengan ketentuan dalam penelitian, dalam proses penelitian, penulis juga akan membutuhkan studi literatur atau kajian pustaka. selain

itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bersifar primer dan data sekunder. data primer dapat diperoleh beberapa situs resmi dan beberapa data-data langsung dari pemerintah Jepang melalui website resmi. sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah. kemudian penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menjabarkan argumentasi dalam penelitian ini.

c. Proses Penelitian

Proses dalam penelitian ini menggunakan kajian deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran peran, upaya dan juga kontribusi Jepang dalam mempertahankan perjanjian CPTPP pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Hal yang menjadi fokus utama pertama adalah strategi Jepang dalam mempertahankan negosiasi perjanjian tersebut.

Hal yang pertama dalam pembahasan kajian deskriptif-analitik adalah studi kepustakaan yang mencari data-data informasi mengenai CPTPP kemudian mengenai mengenai bergabungnya Jepang dengan CPTPP, Kemudian dilanjutkan dengan analisis data terkait informasi yang sudah dihimpun dalam rangka untuk mengetahui upaya dan peran dari Jepang dalam mempertahankan perjanjian TPP pada masa pemerintahan Shinzo Abe 2017-2018.